

## DAFTAR PUSTAKA

- Cristina. (2021). *Kenali Apa itu Wajib Pajak Non Efektif*. Retrieved JANUARI 30, 2022, from PAJAKKU: <https://www.pajakku.com/read/60595195efa1bb468437ddcd/Kenali-Apa-itu-Wajib-Pajak-Non-Efektif%C2%A0>
- Ditiningtyas, A. (2018). Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *LAPORAN TUGAS AKHIR*, 10.
- Fatimah. (2021). *Cara dan Syarat Pengajuan NPWP Non-Efektif*. Retrieved JANUARI 30, 2022, from PAJAKKU: <https://www.pajakku.com/read/602f1b3f5bddc138006e326d/Cara-dan-Syarat-Pengajuan-NPWP-Non-Efektif>
- Irianti, F. (2019). Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. *Laporan Tugas Akhir*, 6-7.
- KPP Pratama Medan Polonia. (2021). *Buku Profil KPP Pratama Medan Polonia*. Medan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: ANDI Yogyakarta.
- Salsabila, R. (2016). Mengembalikan Potensi Pajak Yang Hilang Dengan Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif Di KPP Pratama Klaten Tahun 2013-2015. *TUGAS AKHIR*, 28-30.
- Wulan, K. (2019). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Retrieved november 2021, from pajakku:

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak . 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok

Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.